Volume 4 No 4. Oktober 2019

p-ISSN:2477-8192 dan e-ISSN: 2502-2776

PEMETAAN DISTRIBUSI FUNGSI KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MUNA BERDASARKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (GIS)

Asnani Luxfiati¹, La Harudu²

¹Program Studi Pendidikan Geografi
Universitas Halu Oleo

Email: asnaniLuxfiatiringkawala@gmail.com

²Program Studi Pendidikan Geografi
Universitas Halu Oleo

Email: lahurudu@uho.ac.id

(Received: 2 September 2019; Accepted: 19 Oktober 2019; Published: 29 Oktober 2019)

©2019 –Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>).

ABSTRACT

Land clearing and forest use outside the direction of its functions in Muna Regency is a major factor in the reduction of forest area, especially protected forests, so information is needed in regulating the functions of forest areas to run according to the direction of their functions. The purpose of this study is (1) to knowing the distribution of forest area functions in each District in Muna Regency (2) to knowing the compare the outputs of forest area function maps with the utilization forest area functions according forest the Muna Regency RTRW. The study was conducted Muna Regency in 2019/2020 by using a qualitative descriptive method with data analysis techniques scoring overlay with existing parameters. The results of the study show (1) the distribution of forest area functions in Muna Regency there are three, namely production forest areas, limited production forests and protected forests. The production forest area is spread in 22 sub-districts in Muna Regency with an area of 118942.18 ha (65.04%), limited production forest areas are located in several sub-districts such as Bone, Kontunaga, Lasalepa, Lohia, sub-district with an area of 41095.61 ha (22.47%) and protected forest areas which are scattered in several sub-districts such as Maligano, Napabalano with a forest area amounting to 22836.4 ha (12.49%). (2) Comparison of the outputs of forest area function maps with forestry maps of the Muna Regency RTRW, which are located in two additional parameters, namely the springs protection area and the coastal border area which are used as functions of protected forest areas. This comparison shows that the map output results that are in accordance with forest utilization according to the Muna Regency RTRW are 54269.67 ha (81.19%) and that are not in accordance 15077.79 ha (22.56 %).

Keywords: Mapping, Geographic Information System, Distribution of Forest Area Functions.

ABSTRACT

Pembukaan lahan dan pemanfaatan hutan diluar arahan fungsinya di Kabupaten Muna menjadi faktor utama berkurangnya luas kawasan hutan terutama hutan lindung ,sehingga diperlukan informasi dalam mengatur fungsi kawasan hutan agar berjalan sesuai dengan arahan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui persebaran fungsi kawasan hutan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Muna (2) untuk mengetahui perbandingan hasil output peta fungsi

kawasan hutan dengan pemanfaatan fungsi kawasan hutan menurut peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna. Penelitian dilakukan di Kabupaten Muna tahun 2019/2020 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data overlay dengan scoring parameter-parameter yang ada. Hasil penelitian menunjukkan (1) persebaran fungsi kawasan hutan di Kabupaten Muna ada tiga yaitu kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Kawasan hutan produksi persebarannya terdapat di 22 Kecamatan di Kabupaten Muna dengan luas 118942,18 ha (65,04%) kawasan hutan produksi terbatas terletak di beberapa Kecamatan seperti Bone, Kontunaga, Lasalepa, Lohia dengan luas 41095,61 ha (22,47%) dan kawasan hutan lindung yang persebarannya terletak di beberapa Kecamatan seperti Maligano, Napabalano dengan luas 22836,4 ha (12,49%). (2) Perbandingan hasil output peta fungsi kawasan hutan dengan peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna yaitu terletak pada dua parameter tambahan yaitu area perlindungan mata air dan area sempadan pantai yang dijadikan sebagai fungsi kawasan hutan lindung. Perbandingan ini menunjukkan hasil output peta yang sesuai dengan pemanfaatan hutan menurut RTRW Kabupaten Muna adalah seluas 54269,67 ha (81,19%) dan yang tidak sesuai seluas 15077,79 ha (22,56%).

Kata Kunci: Pemetaan, Sistem Informasi Geografis, Sebaran Fungsi Kawasan Hutan.

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Geografis atau yang lebih dikenal dengan SIG mulai dikenal pada awal 1980-an. Menurut Wibowo, dkk (2015) SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Data penganalisa menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) berbasis data spasial salah satunya melalui pemetaan.

Menurut Rusdiyanto (2017) pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah meliputi daerah dataran tinggi, daerah pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus. Salah satu bentuk pemetaan kawasan adalah pemetaan fungsi kawasan hutan.

Menurut PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Muna No.2 tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Muna Tahun 2013-2033 terdapat persebaran fungsi kawasan hutan disetiap Kecamatan Kabupaten Muna. Adapun luas tiap fungsi kawasan hutan tersebut yaitu hutan lindung ditetapkan seluas 37324,01 ha selanjutnya hutan produksi ditetapkan seluas 30674,87 ha dan kawasan hutan produksi terbatas ditetapkan seluas 1258,58 ha.

Berdasarkan data yang bersumber dari RTRW Kabupaten Muna tahun 2013-2033 merupakan data kehutanan sebelum adanya pemekaran dengan Muna Barat. Tentunya akan ada perubahan yang signifikan terhadap persebaran fungsi kawasan hutan berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Muna setelah

terjadi pemekaran dengan Muna Barat. Pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus untuk keperluan masyarakat serta sering terjadinya pemanfaatan hutan diluar arahan fungsinya menjadi faktor utama berkurangnya luas kawasan hutan tersebut terutama hutan lindung.

Permasalahan yang kompleks di atas dapat mengurangi fungsi kawasan hutan itu sendiri baik masalah yang berkaitan dengan penurunan luas kawasan hutan akibat pembukaan lahan dan pemanfaatan hutan diluar arahan fungsinya yang tidak memperhatikan kawasan hutan lindung ataupun sebagian dari masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai tata area fungsi kawasan hutan yang di sebabkan masih terbatasnya data-data yang berupa uraian-uraian yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu perlu adanya analisis mengenai arahan fungsi kawasan hutan sehingga berdasarkan arahan tersebut dapat dianalisis perbandingan antara arahan-arahan fungsi hutan dengan kawasan hutan untuk mengetahui kesesuaian dalam hal pemanfaatan fungsi kawasan hutannya dengan menggunakan data yang berbentuk pemetaan spasial dengan Sistem Informasi Geografi (SIG).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam Sujarweni (2014) Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan

atau tulisan dan perilaku orang-orang yang

diamati.

berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2019 dengan lokasi penelitian

Alat dan Bahan

Tabel 1. Alat Yang Digunakan Dalam Penelitian

No.	Alat	Kegunaan
1.	Seperangkat Komputer/PC	Sebagai sarana untuk mengolah semua data yang diperoleh
2.	Kamera Digital	Untuk mengambil data gambar di lapangan
3.	Alat Tulis	Sebagai sarana untuk menulis data wawancara dan data penunjang lainnya
4.	GPS	Sebagai pengambilan titik koordinat
5.	Software ArcGis 10.1	Sebagai perangkat yang digunakan untuk mengolah data peta yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 2. Bahan Yang Digunakan Dalam Penelitian

No.	Bahan	Kegunaan	Skala
1.	Peta Kemiringan Lereng	Sebagai parameter fungsi kawasan hutan	1:300.000
2.	Peta Jenis Tanah	Sebagai parameter fungsi kawasan hutan	1:300.000
3.	Peta Curah Hujan	Sebagai parameter fungsi kawasan hutan	1:300.000
4.	Peta Administrasi	Untuk menentukan sebaran fungsi kawasan hutan	1:300.000

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *overlay* dengan *Scoring*, dengan beberapa parameter-parameter yang digunakan yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Parameter-parameter dalam bentuk *scoring* dari masing-masing klasifikasi yang telah ditentukan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian yaitu berupa data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data peta berupa: peta kemiringan

lereng, peta jenis tanah, peta curah hujan, dan peta administrasi Kabupaten Muna.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *overlay* dengan *scoring*. Penentuan fungsi kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan teknik *Overlay* (tumpang tindih) dengan beberapa peta yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Parameter Penentuan Arah Fungsi Kawasan Hutan

a. Kemiringan Lereng

Berdasarkan tabel dibawah, dapat diketahui bahwa kemiringan lereng di Kabupaten Muna terdapat empat jenis kelas lereng yaitu kelas lereng 0-8%, 8-15%, 15-40% dan >40%.

Kelerengan dengan kategori datar (0-8%) mempunyai luas sebesar 80505,64 ha kemudian kelas lereng dengan kategori Landai (8-15%) dengan luas 49391,83 ha dan kelas lereng dengan kategori agak curam (15-40%)

mempunyai luas sebesar 30140,32 ha serta kelas lereng dengan kategori sangat curam (>40%) luasnya yaitu sebesar 22836,4 ha. Adapun klasifikasi kemiringan lereng di Kabupaten Muna dapat dilihat pada (Tabel 3).

Tabel 3. Klasifikasi Kemiringan Lereng di Kabupaten Muna

No.	Kelas Lereng	Skor	Luas (ha)	Persentase
1.	0-8% (Datar)	20	80505,64	44.02%
2.	8-15% (Landai)	40	49391,83	27.01%
3.	15-40% (Agak curam)	70	30140,32	16.48%
4.	>40% (Sangat Curam)	100	22836,4	12.49%
Jumlah			182.874,19	100%

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019.

b. Jenis tanah

Berdasarkan tabel dibawah diketahui bahwa Kabupaten Muna memiliki enam kategori jenis tanah yang meliputi tanah mediteran , tanah gleisol, tanah kambisol, tanah litosol, tanah podsolik, dan tanah renzina. Jenis tanah mediteran memiliki luas sebesar 55332,54 ha. Tanah gleisol luasnya

mencapai 8644,11 ha kemudian jenis tanah kambisol luasnya sebesar 89047,54 ha, tanah litosol dengan luas sebesar 14495,91 ha selanjutnya jenis tanah podsolik yang luasnya mencapai 6603,15 ha serta untuk jenis tanah renzina memiliki luas sebesar 8054,12 ha. Adapun klasifikasi jenis tanah di Kabupaten Muna disajikan pada (Tabel 4).

Tabel 4. Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Muna

No.	Jenis Tanah	Skor	Luas (ha)	Persentase
1.	Mediteran	45	55332,54	30,37%
2.	Gleisol	15	8644,11	4,74%
3.	Kambisol	45	89047,54	48,88%
4.	Litosol	75	14495,91	7,96%
5.	Podsolik	60	6603,15	3,62%
6.	Renzina	75	8054,12	4,42%
Jumlah			182177,4	100%

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

c. Curah hujan

Berdasarkan data tabel dibawah, curah hujan harian di Kabupaten Muna berada dikategori yang sangat rendah dengan intensitas curah hujannya yaitu berkisar 3.61 mm/hari, 3,64 mm/hari, 4,02 mm/hari, 5,1

mm/hari, 5,22 mm/hari, 5,59 mm/hari, 5,7 mm/hari, 5,72 mm/hari dan 6,21 mm/hari. Penjabaran luas intensitas curah hujan ditiap Kecamatan di Kabupaten muna (Tabel 5).

Tabel 5. Klasifikasi Curah Hujan di Kabupaten Muna

No	Curah Hujan Harian (mm)	Skor	Luas (ha)	Persentase
1.	3,61	10	35687,73	19,51%
2.	3,64	10	3815,49	2,09%
3.	4,02	10	30744,66	16,81%
4.	5,1	10	3795,64	2,08%
5.	5,22	10	40115,4	21,94%
6.	5,59	10	37494,81	20,50%
7.	5,7	10	4123,79	2,25%
8.	5,72	10	26831,1	14,67%
9.	6,21	10	265,57	0,15%
Jumlah			182874,19	100%

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

d. Analisis Arahan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Muna

Dengan memperhatikan ke-3 parameter penentuan fungsi arahan kawasan, skor dari tiap masing-masing parameter dijumlahkan sehingga hasil dari skor tersebut menentukan persebaran arahan fungsi kawasan hutan disetiap Kecamatan di Kabupaten Muna dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut bahwa kawasan yang jumlah skornya ≤ 124 merupakan kawasan dengan fungsi budidaya yang dicadangkan sebagai hutan produksi, kawasan yang jumlah skornya 125-174 merupakan kawasan dengan fungsi penyangga

yang dicadangkan sebagai hutan produksi terbatas, dan kawasan yang jumlah skornya ≥ 175 merupakan kawasan dengan fungsi lindung yang dicadangkan sebagai hutan lindung. Berdasarkan dari ketentuan tersebut, setelah di *scoring* hasil yang didapat ada tiga arahan fungsi kawasan hutan di lokasi penelitian yakni hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan lindung (HL) yang disajikan pada (Tabel 6), gambar peta persebaran arahan fungsi kawasan hutan Kabupaten Muna pada (Gambar 1) serta penjabaran perkecamatan pada (Tabel 7).

Tabel 6. Klasifikasi Arahan Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan 3 Parameter

No.	Scoring	Kawasan hutan	Arahan Fungsi hutan	Luas (ha)	Persentase
1.	≤ 124	Kawasan Budidaya	Hutan Produksi (HP)	118942,18	65,04%
2.	125-175	Kawasan Penyangga	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	41095,61	22,47%
3.	≥ 175	Kawasan Lindung	Hutan Lindung (HL)	22836,4	12,49%
Jumlah				182874,19	100%

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

Gambar 1. Peta Persebaran Arahan Fungsi Kawasan Hutan di Kab. Muna
(Sumber: Hasil Analisis Data, 2019)

Tabel 7. Persebaran Arahan Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Muna

No.	Kecamatan	Luas Arahan Fungsi Kawasan Hutan (ha)		
		Arahan Hutan Produksi	Arahan Hutan Produksi Terbatas	Arahan Hutan Lindung
1.	Kec. Batalaiworu	1378,28	898,95	-
2.	Kec. Batukara	2776,16	881,57	3401,27
3.	Kec. Bone	4608,89	3788,81	-
4.	Kec. Duruka	1207,39	-	-
5.	Kec. Kabangka	9169,32	-	-
6.	Kec. Kabawo	13549,22	698,55	168,34
7.	Kec. Katobu	1472,48	1,01	-
8.	Kec. Kontu Kowuna	3594,53	55,48	-
9.	Kec. Kontunaga	3292,63	1426,54	903,66
10.	Kec. Lasalepa	5181,53	2205,47	-
11.	Kec. Lohia	3160,15	1251,51	2191,45
12.	Kec. Maligano	8723,77	1116,92	7236,27
13.	Kec. Marobo	9305,3	-	-
14.	Kec. Napabalano	9622,79	132,33	1284,75
15.	Kec. Parigi	13598,07	165,24	-
16.	Kec. Pasi Kolaga	420,77	1824,79	-
17.	Kec. Pasir Putih	2726,15	2043,29	3855,12
18.	Kec. Tongkuno	12737,34	20375,58	1993,75
19.	Kec. Tongkuno Selatan	3199,17	1184,24	-
20.	Kec. Towea	2578,78	-	-
21.	Kec. Wakorumba Selatan	2769,21	1617,14	1609,24
22.	Kec. Watopute	3870,25	1428,19	192,55
Jumlah		118942,18	41095,61	22836,4

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019.

e. Persebaran Fungsi Kawasan Hutan Menurut Peta Kehutanan RTRW Kabupaten Muna

Berdasarkan peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna, luas fungsi kawasan hutan di Kabupaten Muna keseluruhannya yaitu sebesar 69.347,46 ha dimana pada peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna ini terdapat lima fungsi kawasan hutan yaitu fungsi hutan

produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung dan hutan suaka alam. Lebih jelasnya fungsi kawasan hutan menurut peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna ada pada (Tabel 8), gambar peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna dapat dilihat pada (Gambar 2) dan penjabaran fungsi kawasan hutan tiap Kecamatannya pada (Tabel 9).

Tabel 8. Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan RTRW Kab.Muna

No.	Fungsi Kawasan Hutan	luas (ha)	Persentase
1.	Hutan produksi (HP)	26587,51	38,34%
2.	Hutan produksi terbatas (HPT)	1258,58	1,81%
3.	Hutan lindung (HL)	24148,78	34,82%
4.	Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	4177,36	6,02%
5.	Hutan suaka alam (HSA)	13175,23	18,99%
Jumlah		69.347,46	100%

Sumber: Peta Kehutanan RTRW Kabupaten Muna, 2016

Gambar 2. Peta kawasan hutan RTRW Kabupaten Muna (RTRW Kabupaten Muna Tahun 2013-2033)

Tabel 9. Luas Fungsi Kawasan Hutan RTRW Kab.Muna Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Fungsi Kawasan Hutan (ha)				
		HP	HPT	HL	HPK	HSA
1.	Kec. Batalaiworu	975,40	-	130,98	-	-
2.	Kec. Batukara	-	-	258,33	-	3936,98
3.	Kec. Bone	230,43	-	68,44	64,7	-
4.	Kec. Duruka	-	-	165,68	-	-
5.	Kec. Kabangka	-	-	190,18	290,06	-
6.	Kec. Kabawo	3785,26	-	883,53	-	-
7.	Kec. Katobu	-	-	425,86	-	-
8.	Kec. Kontu Kowuna	-	-	-	-	-
9.	Kec. Kontunaga	953,13	-	112,88	-	-
10.	Kec. Lasalepa	3870,92	-	479,22	-	-
11.	Kec. Lohia	6,01	-	1334,05	-	-
12.	Kec. Maligano	-	-	34,23	-	9037,19
13.	Kec. Marobo	275,11	-	2053,1	899,64	-
14.	Kec. Napabalano	5782,7	-	1948,34	-	10,37
15.	Kec. Parigi	927,57	-	1465,27	-	-
16.	Kec. Pasi Kolaga	-	-	-	-	-
17.	Kec. Pasir Putih	1073,48	1258,58	868,85	2385,16	-
18.	Kec. Tongkuno	5392,81	-	12193,07	-	-
19.	Kec. Tongkuno Selatan	183,6	-	-	-	-
20.	Kec. Towea	-	-	-	-	-
21.	Kec. Wakorumba Selatan	338,55	-	843,44	537,79	190,69
22.	Kec. Watopute	2792,54	-	693,33	-	-
Jumlah		26587,51	1258,58	24148,78	4177,36	13175,23

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

f. Perbandingan Peta Persebaran Arah Fungsi Kawasan Hutan (Hasil Analisis) dengan Peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna

Perbandingan peta dilakukan guna untuk mengetahui kesesuaian letak fungsi kawasan hutannya dari peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna dengan hasil analisis arahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Muna. Perbandingan dilihat dari segi luas an hutan dengan jenis fungsi kawasan hutannya. Berdasarkan hasil analisis peta arahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Muna dengan menggunakan tiga parameter memiliki perbedaan jumlah luasan dengan peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna, dimana jumlah total keseluruhan luas hasil *output* peta arahan fungsi kawasan hutan sebesar

182.874,19 ha sedangkan jumlah total keseluruhan luas fungsi kawasan hutan dari peta kehutanan RTRW yaitu seluas 69.347,46 ha. Adanya perbedaan luasan ini disebabkan karena pada hasil *output* secara keseluruhan luasnya tidak memperhitungkan untuk penggunaan lain misalnya seperti permukiman, perkebunan, dan sebagainya sedangkan pada peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna terdapat pembagian masing-masing luas kawasan termasuk dihitung dengan (APL) area penggunaan lainnya. Perbandingan jika dilihat dari fungsi kawasan hutannya dapat diketahui jika hasil *output* peta arahan fungsi kawasan hutan di *overlay* dengan peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna. Adapun penjelasan perbandingan lebih lengkapnya dapat dilihat pada (Tabel 10).

Tabel 10. Perbandingan Arahan Fungsi Hutan Dengan Kehutanan RTRW

No.	Arahan Fungsi Kawasan Hutan	Fungsi Kawasan hutan RTRW Kab.Muna	Luas (ha)	Persentase
1.	Hutan lindung	Hutan lindung	2416,66	3,48%
2.	Hutan lindung	Hutan produksi	3453,39	4,98%
3.	Hutan lindung	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	1374,99	1,98%
4.	Hutan lindung	Hutan produksi terbatas	1251,43	1,80%
5.	Hutan lindung	Hutan suaka alam	9279,5	13,38%
6.	Hutan produksi terbatas	Hutan lindung	7727,38	11,14%
7.	Hutan produksi terbatas	Hutan produksi	8692,47	12,53%
8.	Hutan produksi terbatas	Hutan produksi yang dapat dikonversi	298,36	0,43%
9.	Hutan produksi terbatas	Hutan suaka alam	1668,1	2,41%
10.	Hutan produksi	Hutan lindung	14004,74	20,20%
11.	Hutan Produksi	Hutan produksi	14441,65	20,83%
12.	Hutan produksi	Hutan produksi yang dapat dikonversi	2504,01	3,61%
13.	Hutan produksi	Hutan produksi terbatas	7,15	0,01%
14.	Hutan produksi	Hutan suaka alam	2227,63	3,21%
Jumlah			69.347,46	100%

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

Penentuan peruntukkan arahan fungsi kawasan hutan dari SK Menteri Pertanian adalah mencari potensi-potensi kawasan yang bisa diperuntukkan untuk arahan hutan, namun tidak semua kawasan dapat diperuntukkan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak UPTD KPH (Unit VI) Kabupaten Muna luas kawasan yang ditetapkan sebagai hutan adalah 30% dari peruntukkan arahan fungsi kawasan hutan. Hal

tersebut juga mengacu pada Undang-undang No.41 Tahun 1999 tertuang bahwa kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal seluas 30% dari luas wilayah. Lebih jelasnya berikut adalah tabel perbandingan luas yang ditempati oleh hutan dan yang tidak ditempati oleh hutan (nonhutan) guna untuk melihat seberapa besar persentase luas yang ditetapkan sebagai kawasan hutan (Tabel 11).

Tabel 11. Perbandingan Total Luas Hutan dan Nonhutan

No.	Total Luas Hutan		Total Luas Nonhutan (APL)	
	Luas Hutan (ha)	Persentase	Luas Hutan (ha)	Persentase
1.	69347,46	37,92%	113526,73	62,08%

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

Gambar 3. Peta Perbandingan Arahkan Fungsi Kawasan Hutan dan RTRW Kabupaten Muna
(Sumber: Hasil Analisis Data, 2019)

Tabel 12. Perbandingan Arahkan Kawasan Hutan dan Fungsi Kawasan Hutan

No.	Arahkan Fungsi Kawasan Hutan	Fungsi Kawasan Hutan (RTRW) Kab. Muna	Keterangan	Luas (ha)
1.	Hutan lindung	Hutan lindung	Sesuai	2416,66
2.	Hutan lindung	Hutan produksi	Tidak sesuai	3453,39
3.	Hutan lindung	Hutan produksi yang dapat dikonversi	Tidak sesuai	1374,99
4.	Hutan lindung	Hutan produksi terbatas	Tidak sesuai	1251,43
5.	Hutan lindung	Hutan suaka alam	Sesuai	9279,5
6.	Hutan produksi terbatas	Hutan lindung	Sesuai	7727,38
7.	Hutan produksi terbatas	Hutan produksi	Tidak sesuai	8692,47
8.	Hutan produksi terbatas	Hutan produksi yang dapat dikonversi	Tidak sesuai	298,36
9.	Hutan produksi terbatas	Hutan suaka alam	Sesuai	1668,1
10.	Hutan produksi	Hutan lindung	Sesuai	14404,74
11.	Hutan produksi	Hutan produksi	Sesuai	14441,65
12.	Hutan produksi	Hutan produksi yang dapat dikonversi	Sesuai	2504,01
13.	Hutan produksi	Hutan produksi terbatas	Tidak sesuai	7,15
14.	Hutan produksi	Hutan suaka alam	Sesuai	2227,63
Jumlah				66,843,45

Sumber: Hasil Analisis Data, 2019

Berdasarkan data tabel 11 dan peta perbandingan diketahui bahwa arahan hutan lindung yang ditempati oleh hutan lindung ataupun hutan suaka alam peruntukannya sudah sesuai karena fungsinya dalam hal pemanfaatan hutan sama sedangkan arahan hutan lindung yang ditempati oleh hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi ataupun hutan produksi terbatas peruntukannya tidak sesuai karena apapun yang berkaitan dengan kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan sama sekali adanya pemanfaatan kawasan lindung diluar fungsinya.

Arahan hutan produksi terbatas yang ditempati oleh hutan lindung dan hutan suaka alam peruntukannya sudah sesuai karena terlihat kemiringan lerengnya berada pada kelas 15-40% (agak curam) sedangkan arahan hutan produksi terbatas yang ditempati oleh hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi peruntukannya tidak sesuai karena hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi termasuk dalam kawasan budidaya yang dalam hal pemanfaatan hutannya beda dengan hutan produksi terbatas dimana hutan produksi yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai kebutuhan perluasan, pengembangan wilayah misalnya seperti pertanian, perkebunan, permukiman, transigrasi sama halnya dengan hutan produksi yang dapat dikonversi yang kawasan hutannya yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan misalnya seperti perkebunan, permukiman, transmigrasi sedangkan hutan produksi terbatas termasuk kawasan penyangga yaitu kawasan hutan yang pemanfaatannya yang lebih kearah pertanian untuk menghasilkan kayu hutan yang hanya dapat dieksploitasi secara terbatas dengan cara tebang pilih saja.

Arahan hutan produksi yang ditempati oleh hutan lindung peruntukannya sesuai karena berdasarkan SK Mentan No.683/Kpts/Um/8/1981 tertuang bahwa hutan produksi pada prinsipnya secara terbatas berfungsi pula sebagai hutan lindung jika dilihat dari kemiringan lerengnya yang berada dikelas lereng 15-40% (agak curam), terlihat sepenuhnya berada dibagian pinggir kawasan pesisir dan merupakan area perlindungan mata air. Area sekitar mata air dijadikan sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan KEPPRES RI No.32 tahun 1990. Dalam peraturan tersebut tertuang bahwa kawasan sekitar mata

air mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air sehingga area tersebut dijadikan sebagai kawasan lindung dan ditetapkan sebagai hutan lindung. Arahan hutan produksi terbatas yang ditempati oleh hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi peruntukannya tidak sesuai karena secara fungsinya dalam hal pemanfaatan hutannya yang berbeda.

Jadi, hasil perbandingan menunjukkan terdapat 2 parameter tambahan untuk menunjukkan fungsi kawasan hutan yaitu area perlindungan mata air dan area sempadan pantai. Hal ini berdasarkan peraturan dari KEPPRES RI No.32 tahun 1990 dan atas dasar kebijakan pemerintah Kabupaten Muna.

PEMBAHASAN

Setiap fungsi kawasan hutan dapat ditentukan jika terlebih dahulu dapat diketahui arahnya. Arahan fungsi kawasan hutan berkaitan dengan indikator parameter yang digunakan dimana tiap parameter mempunyai *scoring* penentuan arahan fungsi kawasan hutan yaitu skor dengan jumlah ≤ 124 maka dicadangkan sebagai hutan produksi, skor dengan jumlah 125-175 maka dicadangkan sebagai hutan produksi terbatas dan skor dengan jumlah maka dicadangkan sebagai hutan lindung ≥ 175 .

Berdasarkan penjelasan data parameter dapat disimpulkan bahwa faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan berpengaruh dalam penentuan arahan fungsi kawasan hutan sehingga dapat menentukan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Muna. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Muna memiliki kemiringan lereng yang beragam yakni 0-8% (datar), 8-15% (landai), 15-40% (agak curam) dan $>40\%$ (sangat curam). Jenis tanahnya yang bervariasi di mulai dari jenis tanah mediteran, tanah gleisol, tanah kambisol, tanah litosol, tanah podsolik, dan tanah renzina dengan intensitas curah hujan yang tergolong sangat rendah yaitu 0-13,6 mm/hari hujan.

Setelah dilakukan analisis data hasil yang didapat bahwa ada arahan fungsi hutan yang peruntukannya tidak sesuai dengan peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna salah satunya kawasan lindung yang diarahkan sebagai hutan lindung peruntukannya di RTRW Kabupaten Muna ditempati oleh hutan produksi ataupun hutan produksi terbatas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama

Kepala bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan (KPH) Kabupaten Muna hal tersebut disebabkan karena pemanfaatan hutannya yang belum terealisasi dengan benar. Adanya penegakan hukum yang tidak maksimal diimbangi dengan sering terjadinya pengalihan fungsi kawasan hutan yang menjadi penyebab utama berkurangnya luasan fungsi kawasan hutan demi mencukupi kebutuhan primer masyarakat Kabupaten Muna.

Hasil wawancara juga mengatakan bahwa akibat desakan ekonomi yang secara memaksa sehingga kebanyakan kawasan hutan lindung yang dijadikan sebagai tempat sumber mata pencaharian masyarakat dengan cara berkebun dalam hutan. Pihak KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Kabupaten Muna mengambil tindakan untuk meminimalisir terjadinya pemanfaatan kawasan hutan diluar fungsinya yaitu dengan cara masyarakat diizinkan untuk berkebun didalam kawasan lindung tapi tidak boleh untuk membangun dan diadakannya kegiatan perhutanan sosial. Kegiatan perhutanan sosial merujuk pada SK No.P83 Tahun 2016 adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan sehingga dengan adanya kegiatan perhutanan sosial masyarakat Muna diharapkan mampu untuk memanfaatkan hutan dengan baik sesuai fungsi masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah persebaran fungsi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Muna terdiri atas tiga yaitu kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Kawasan hutan produksi persebarannya terdapat di 22 kecamatan di Kabupaten Muna dengan luas 118942,18 ha (65,04%) kawasan hutan produksi terbatas terletak di beberapa Kecamatan seperti Bone, Kontunaga, Lasalepa, Lohia, dengan luas 41095,61 ha (22,47%) dan kawasan hutan lindung yang persebarannya

terletak di beberapa Kecamatan seperti Maligano, Napabalano, dengan luas kawasan hutan sebesar 22836,4 ha (12,49%).

Perbandingan hasil *output* peta fungsi kawasan hutan dengan peta kehutanan RTRW Kabupaten Muna yaitu terletak pada dua parameter tambahan yaitu area perlindungan mata air dan area sempadan pantai yang dijadikan sebagai fungsi kawasan hutan lindung. Perbandingan ini menunjukkan hasil *output* peta yang sesuai dengan pemanfaatan hutan menurut RTRW Kabupaten Muna adalah seluas 54269,67 ha (81,19%) dan yang tidak sesuai seluas 15077,79 ha (22,56%).

SARAN

Pemanfaatan fungsi kawasan hutan hendaknya memperhatikan fungsi dari masing-masing kawasan hutan tersebut agar hutan dapat dikelola dengan tidak merusak kawasan hutannya ataupun sekitarnya.

Sebaiknya pemerintah lebih teliti dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan agar tidak terjadi pemanfaatan hutan diluar fungsinya. Sedangkan sebaiknya pihak kehutanan Kabupaten Muna dalam menentukan fungsi kawasan hutan lebih diperhatikan penentuan arahnya yang berkaitan dengan parameter dan *scoring* yang digunakan agar hasil yang didapatkan lebih sesuai dengan keadaan lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Drs. La Harudu, M.Si., selaku pembimbing serta para reviewer dan editor Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi.

DAFTAR PUSTAKA

- PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Muna No.2 tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Muna Tahun 2013-2033.
- Rusdiyanto. (2017). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Fasilitas Umum di Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 Kota Lubuklinggau. *JUTIM. Vol. 2. No. 2.*
- SK No.P83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wibowo, Koko Mukti dkk. (2015). Sistem Informasi Geografis (SIG) Menentukan Lokasi Pertambangan

Batu Bara di Provinsi Bengkulu Berbasis Website. Jurnal Media Infotama. Vol. 11.